

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arianus Harefa. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Deponeering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Febrisari, Rizki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Naba Edukasi, 2025.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Hery, Alexander. *Pengantar Hukum Indonesia: Mengulas Sejarah Tata Hukum, Politik Hukum, Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2024.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia*. Jambi: Sonpedia, 2025.
- Kurniawan Tri Wibowo. *Filsafat Hukum Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan*. Jakarta Selatan: PT. Cipta Gadhing Artha, 2021.
- Lesmana, Andi. *Sistem Hukum Indonesia*. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nitaria Angkasa. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Ravena, Dey. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Riadi, Dafit. *Pergeseran Fungsi Penuntutan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Seregig, I Ketut. *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
- Sigit Sapto Nugroho. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Sinulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zunaidi, Ahmad Hajar. *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Jakarta: Kencana, 2022.

## B. Artikel Ilmiah

Agustalita, Dinda Heidiyuan. "Makna 'Kepentingan Umum' Pada Kewenangan 'Deponering' Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 160–189.

Ahmad Ihsan Amri, dan Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Asas Equality Before The Law ( Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain )." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95.

Akmal, Diya Ul. "Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam Konstruksi Legislasi Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 17–40.

Andriani, Lisna. "Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Komitmen Organisasional Terhadap Perilaku Suka Reli (*Organizational Citizenship Behavior*) Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Administrative Rerform* 9, no. 1 (2021): 1–10.

Anggreani, Siti Mujiana. "Asas Oportunitas Pada Kewenangan Kejaksanaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Umum." *Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 70–86.

Apriyanto, Dadang. "Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 1 (2023): 60–71.

Badaru, Baharuddin. "Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1737–1754.

Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92.

Dewi, Ni Luh Rika Purnama. "Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 13, no. 2 (2025): 1443–1452.

Endri. "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Dan Perkembangannya." *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 89–93.

Febrianto, Joghinanda Raihan, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Diskresi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025): 1–15.

- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367.
- Hasan, Damiri. "Diskresi *Seponering* Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto Dan Chandra Martha Hamzah." *Intizar* 22, no. 1 (2020): 35–54.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–149.
- Iqbal, Muhammad. "Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistim Peradilan Pidana." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 1–12.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22.
- Kurniawan, Moch. Ichwan. "*Application of the Principle of Equality Before the Law in Criminal Justice Practice.*" *Jurnal Fasya* 1 (2023): 99–106.
- Laia, Aturkian, dan Purwanto. "Kebenaran Dan Keadilan Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 1–14.
- Laiya, Murni Hati, dan Herlina Manullang. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Oportunitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 1–14.
- Melisa. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pranata Islam* 5, no. 1 (2023): 241–254.
- Mokorimban, Bonifasius Petrus Sando. "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2024): 1–11.
- Muhammad. "Integrasi Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan." *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7* 4, no. 7 (2023): 1–15.
- Mustriadhi, Aris. "Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung." *Yurispruden* 3, no. 1 (2021): 1–15.

- Nagara, Airlangga Surya. "Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Dan Pelaku." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (2025): 154–164.
- Najwa Lutfi Hanifah. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 228–232.
- Narom, Mohammad Nailul, dan Suyanto. "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (Deponering)," 2020.
- Nella Sumika Putri. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72.
- Pramujayanto, Jati Insan. "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 49–66.
- Pravidjayanto, Mochammad Rafi. "Reformasi Pidanaan Korupsi Korporasi Melalui Konstruksi *Model Deferred Prosecution Agreement* berbasis Keadilan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 12, no. 1 (2025): 149–167.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang *Seponering* Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016." *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021): 307–322.
- Ratnasari, Desi. "Kedudukan Hukum Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 17–29.
- Rezky, Nathanael Pratama. "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 216–227.
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *BINUS Journal* 3, no. 2 (2020): 345–353.
- Salman, Tiara. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024): 49–57.
- Sasongko, Andy. "Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum)."

*Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (2022): 105–121.

Satya Widiana, I Gusti Agung Ngurah, Anak Agung Sagung Dewi Laksmi, dan Made Minggu Widyantara. “Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering) Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Analogi Hukum* 4, no. 1 (2022): 60-65.

Siryana, A. M. “Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Papua Law Jurnal* 6, no. 2 (2022): 91–101.

Siti Halilah, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

Somomoeljono, Suhardi. “Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System.” *The International Journal of Law Review and State Administration* 3, no. 5 (2025): 123–132.

Sutin, Kiki Astuti Wulandary. “Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.” *Kalabbirang Law Journal* 3, no. 1 (2021): 20–33.

Triwati, Ani. “Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 32–54.

Wirayudha, M. Dicky. “Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif.” *Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 170–185.

Yoanda Widi Pranata. “Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (2025): 41–47.

Yusnani, Ida. “Arah Reformasi Peradilan Di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum.” *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 75–82.

Z, Angelia Nur Kh. “Dewi Themis Dan Feminisme Hukum : Peran Gender Dalam Keadilan Hukum.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–25.

### **C. Sumber Internet**

Agatha Vidya Nariswari. “Beda Rekam Jejak Eddy Hiariej Vs Bambang Widjojanto, Saling Serang Di Sidang Sengketa Pilpres.” suara.com, 2024. <https://suara.com/lifestyle/2024/04/05/093445/beda-rekam-jejak-eddy>

hiariej-vs-bambang-widjojanto-saling-serang-di-sidang-sengketa-pilpres.  
Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

Agustina, Dewi. "Perjalanan Kasus Bambang Dan Abraham Samad, Dikriminalisasi Hingga Deponering." *Tribunnews.com*, 2016. <https://tribunnews.com/nasional/2016/03/04/perjalanan-kasus-bambang-dan-abraham-samad-dikriminalisasi-hingga-deponering>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

"Akhirnya, Kejaksaan Mendeponir Kasus Bibit-Chandra." *Kontan.co.id*, 2010. <https://nasional.kontan.co.id/news/akhirnya-kejaksaan-mendeponir-kasus-bibit-chandra-1>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2025.

Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Gramedia Blog*, 2022. [gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/](https://gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

ASH. "MK Tegaskan *Seponering* Wajib Perhatikan Saran Badan Negara," 2017. <https://hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-Seponering-wajib-perhatikan-saran-badan-negara-lt587623cfb0e64/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.

Bernadetha Aurelia Oktavira. "Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Menurut Ahli," 2023. <https://hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Fransisco Rosarians. "4 Penikmat *Seponering*." *Tempo.com*, 2017. <https://tempo.co/hukum/4-penikmat-Seponering-1307641>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

"Inilah Kejanggalan Perkara Bambang Widjojanto Dan Abraham Samad." *LBH Jakarta*, 2015. <https://bantuanhukum.or.id/inilah-kejanggalan-perkara-bambang-widjojanto-dan-abraham-samad/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

"Kasus Bibit-Chandra; Kejaksaan Agung Melawan Diri Sendiri." *Indonesia Corruption Watch*, 2010. <https://antikorupsi.org/id/article/kasus-bibit-chandra-kejaksaan-agung-melawan-diri-sendiri>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

"Kontroversi Kasus Bibit-Chandra." *Indonesia Corruption Watch*, 2010. <https://antikorupsi.org/id/article/kontroversi-kasus-bibit-chandra>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Mys. "Bahasa Hukum: *Seponering* Atau Deponering?," 2010.

<https://.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-iSeponeringi-atau-ideponeringi-lt4cecd0c51fb6b/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.

Priambodo, Bono Budi. “Keadilan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Dan Keuangan Negara.” *Hukum Online*, 2024. <https://.hukumonline.com/berita/a/keadilan-sosial--kesejahteraan-sosial--dan-keuangan-negara-lt66fb7f372137d?page=all>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2026.

Ramadhan, Gilang. “Kejagung Resmi Deponering Kasus Samad Dan BW.” *KBR.id*, 2016. [https://kbr.id/articles/indeks/kejagung\\_resmi\\_deponering\\_kasus\\_samad\\_dan\\_bw](https://kbr.id/articles/indeks/kejagung_resmi_deponering_kasus_samad_dan_bw). Diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

RFQ. “*Seponering* Jangan Jadi Jalan Keluar Yang Dipaksakan.” *Hukum Online*, 2016. <https://.hukumonline.com/berita/a/Seponering-jangan-jadi-jalan-keluar-yang-dipaksakan-lt56d97f4838e16/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

Sari, Brigitta Belia Permata. “Yusril Sebut BW Tersangka Seumur Hidup Usai Diprotes Soal Eddy Hiariej Di MK.” *detikcom*, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7278467/yusril-sebut-bw-tersangka-seumur-hidup-usai-diprotes-soal-eddy-hiariej-di-mk>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

Suharsono, Agus. “Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Peradilan Indonesia.” *Dandapala*, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/mewujudkan-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-dalam-peradilan-indonesia>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2026.

“Tim Independen Kasus Bibit-Chandra Diberi Waktu Dua Minggu.” *Kompas.com*, 2009. <https://nasional.kompas.com/read/2009/11/02/14530479/tim-independen-kasus-bibit-chandra-diberi-waktu-dua-minggu>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Yusuf Abdhul Azis. “Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat Dan Contoh.” *deepublishstore.com*, 2023. [https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/?srsltid=AfmBOoojy\\_n3MnxR0J8-BeQoy3Z\\_PxWNa19OxicUXVx5xJ2Wq25qM3o6](https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/?srsltid=AfmBOoojy_n3MnxR0J8-BeQoy3Z_PxWNa19OxicUXVx5xJ2Wq25qM3o6). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

#### **D. Skripsi**

Akhsan, Daffa Ottham. “Putusan Hakim Lebih Rendah Dari Ancaman Hukuman Minimum Dalam Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2024.

Eko Bambang Marsudi. "Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Qayum, Abd. Rahman. "Analisis Yuridis Kewenangan Deponeering Oleh Jaksa Agung Perspektif Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-Xiv/2016)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

#### **E. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016.